KETERANGAN DASAR
KERAJAAN SWAZILAND
APRIL 2007

I. UMUM

1. Nama negara	: Kerajaan Swaziland
2. Ibu kota	: Mbabane. Catatan: daerah Lobamba adalah daerah Kerajaan sekaligus tempat Legislatif.
3. Hari kemerdekaan	: 6 September 1968 (dari Inggris).
4. Kepala negara	: Raja Mswati III.
5. Kepala pemerintahan	: PM Absolom Themba Dlamini.
6. Menteri Luar Negeri	: Mathendele Dlamini.
7. Sistim pemerintahan	: Monarki absolut.
8. Sistim legislatif	: Bikameral.
9. Sistim hukum	: South African Roman Dutch Law.
10. Daerah administrative	: Hhlohho, Lubombo, Manzini dan Shiwelweni.
11. Konstitusi	: Mulai berlaku 8 Februari 2006
12. Bahasa nasional	: Inggris dan Siswati
13. Lagu kebangsaan	: Nkulunkulu
14. Warna bendera	: Merah, Biru, Kuning, Hitam, Putih.
15. A g a m a	: Kepercayaan Tradisional (40%), Roman Catholic 20%, Islam 10%, Anglican, Bahai, Methodist, Mormon, Jewish dan lain-lain 30%.
16. Mata uang	: Lilangeni (dalam bahasa Inggeris berarti Royal), yang dibagi dalam 100 sen. Bentuk jamaknya adalah Emalangeni (E). US$ 1 = E 6.3
17. Tahun anggaran	: 1 April – 31 Maret

18. Jumlah penduduk : 1,136,334 jiwa dengan pertumbuhan penduduk -0.23% (*Perkiraan Juli 2006*).

19. Tingkat kelahiran : 27,41/1000 penduduk.

20. Tingkat kematian : 29,74/1000 penduduk

21. Tingkat harapan hidup : Laki-laki 32 tahun, Perempuan 33 tahun.

22. Komposisi demografis : Afrika 97% dan Eropa 3%

II. GEOGRAFI

1. Luas wilayah : 17.363 kilometer persegi (hampir seluas Propinsi Bengkulu, atau lebih dari 3 kali luas pulau Bali) dengan perincian luas tanah 17,203 Km2 dan air 160 Km2 .

2. Letak geografis/perbatasan : Merupakan land-locked country yang dibatasi oleh Afrika Selatan di sebelah Utara, Barat dan Selatan serta oleh Mozambique di sebelah Timur.

3. Ibu kota /kota wisata : Mbabane (Ibukota) dan Manzini

4. Iklim : musim panas suhu berkisar antara 16-22 derajat Celcius. Namun di musim dingin cukup dingin. Bagian tengah negeri beriklim sub-tropis dan agak lembab selama musim panas dan hujan di bulan Oktober-Maret.

5. Sumber alam : Batu bara, asbes, emas dan berlian, batu permata hasil hutan.

III. SEJARAH

Kerajaan Swaziland baru muncul pada awal abad ke-19, pada periode revolusi pembentukan negara kebangsaan di wilayah Afrika bagian Selatan dan Timur. Kepala keluarga Dlamini, Sobhuza I memimpin orang-orang Ngwane melintasi pegunungan Lobombo sekitar abad ke-18 dan menguasai wilayah yang sekarang terletak di Swaziland bagian Selatan. Namun kemudian terdesak ke Swaziland Tengah, akibat tekanan dari Kemaharajaan Zulu. Ketika meninggal tahun 1839, Sobhuza I mewariskan wilayah kerajaan seluas dua kali dari wilayah Swaziland sekarang ini, yang wilayah Timur Lautnya berbatasan langsung dengan Mozambique dan sebelah Timur dan Tenggara dengan Lautan Hindia. Penggantinya, Raja Mswati I (1839-68) meletakkan dasar-dasar militer-kebangsaan sehingga Swaziland berhasil menjadi kerajaan yang cukup kuat.

Tekanan kuat dari orang-orang Transvaal-Boer tahun 1840'an mengakibatkan Swaziland kehilangan tanah dan beberapa suku taklukannya, antara lain wilayah KwaZulu dan KwaNgwane yang sekarang menjadi bagian Propinsi Transvaal Timur, sehingga wilayahnya sejak tahun 1880 menyusut menjadi Swaziland sekarang. Kemudian, selama 20 tahun orang-orang Boer dan Inggris bersaing memperebutkan pengaruh atas Swaziland. Pada tahun 1894 Swaziland kehilangan kedaulatan dan berada dibawah kekuasaan Inggris.

Proklamasi Pembagian Konsesi tahun 1907 menetapkan 38% dari seluruh tanah Swaziland tetap berada di tangan penduduk Swaziland, 25% dikuasai oleh pemegang konsesi dan lebih dari 30% tetap berada di tangan kerajaan. Tahun 1930 sebanyak 75% dari tanah kerajaan dijual kepada pendatang kulit putih.

Setelah beberapa bulan naik tahta pada tahun 1921, Raja Sobhuza II (lahir tahun 1899) melakukan kampanye yang mendukung pelestarian kekuasaan raja, dan menentang legalitas Inggris yang mengurangi kekuasaan Pemerintahan Kerajaan dan menolak keberadaan Raja di bawah sistem Native Authority. Swaziland memperoleh kemerdekaannya tanggal 6 September 1968.

IV. POLITIK

1. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

a. Sistem Kepartaian

Pada tahun 1960 Swaziland berjuang untuk kemerdekaan melalui pembentukan partai politik pertama, yaitu The Swaziland Progressive Party (SPP), dipimpin oleh J.J. Nguku. Pada tahun 1962, partai SPP terpecah menjadi The Ngawane National Liberatory Congress (NNLC) pimpinan Dr. Ambrose P. Zware yang menjadi partai yang dominan. NNLC merupakan partai nasional ortodoks Afrika yang pada saat itu sangat dipengaruhi oleh doktrin Pan Africanism dari Kwame Nkrumah (Presiden Ghana). Partai INM (Imbokodvo National Movement) sebagai partai tradisional saingan NNLC.

Kemudian, pada tahun 1973, berdasarkan Konstitusi 13 Oktober 1973 partai-partai politik dilarang. Partai-partai yang dianggap illegal antara lain :

a. PUDEMO (Peoples' United Democratic Movement/pimpinan Mario Masulen)
b. SWAYOKO (Swaziland Youth Congress)
c. SWACOPA (Swaziland Communist Party/pimpinan Mphand lama Shongwe)
d. FROLISA (Swaziland Liberation Front)
e. COFUDESWA (Convention for Full Democracy in Swaziland/Sabelo Dlamini)
f. SWANAFRO (Swaziland National Front)
g. NGWASOREP (Ngawane Socialist Revolutionary Party)
h. Swaziland Democratic Alliance (Partai Oposisi penting/Jeory Nxunalo)
i. SFTU (Swaziland Federation of Trade Unions/Jansilhole)

b. Parlemen

Lembaga legislatif Swaziland disebut Libandla dan terdiri dari dua kamar, yaitu Senat dan House of Assembly . Senat terdiri dari 31 senator, 20 diantaranya diangkat oleh raja. Sedangkan House of Assembly terdiri dari 76 anggota yang mewakili setiap tinkhundla (konstituensi), termasuk 10 anggota yang diangkat Raja. Senat dan House of Assembly mempunyai masa kerja 5 tahun.

c. Sistem Pemerintahan

Swaziland tetap mempertahankan sistim tradisional " kerajaan ganda " menurut mana Raja atau Ngwenyama (singa) memerintah bersama dengan Ibu Suri atau Ndlovukazi (Gajah betina). Kepala negara adalah Raja yang berkuasa secara turun menurun. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Raja, demikian pula Kabinet disetujui oleh Raja atas rekomendasi PM. Secara administratif Swaziland dibagi menjadi empat distrik pemerintahan yaitu Lhohho, Lubombo, Manzini dan Shiselweni.

d. Sistem Peradilan

Berdasarkan hukum Romawi – Belanda, seperti yang berlaku di Afrika Selatan. Disamping itu juga berlaku peradilan adat, yaitu hukum adat Swazi. Lembaga peradilan terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding di mana hakim-hakimnya ditunjuk oleh Raja.

e. Konstitusi

Konstitusi yang diberlakukan sejak tanggal 13 Oktober 1978 masih dianggap sama dengan konstitusi tahun 1973 dan belum mencerminkan kehidupan demokrasi karena partai politik masih dilarang melakukan kegiatan. Pemerintah Swaziland telah berupaya menanggapi keinginan rakyat agar kekuasaan Raja dibatasi, antara lain dengan membentuk komisi untuk mengkaji ulang konstitusi Swaziland (Constitutional Review Commission / CRC) pada tahun 1996. Setelah berkali-kali gagal menyampaikan hasil kerjanya, maka pada tanggal 20 Nopember 2000 akhirnya CRC dapat memberikan masukan kepada Raja Mswati III. Pada bulan Juni 2003 Raja Mswati III menyetujui Draft Konsitusi Baru yang telah disusun oleh CRC. Namun baru pada tanggal 8 Februari 2006 konstitusi dimaksud mulai diberlakukan.

2. Perkembangan Politik Dalam Negeri

Pada masa Raja Sobhuza II (1968 - 1982), Swaziland mengalami kesulitan ekonomi dan setelah ia meninggal dunia, situasi politik di Swaziland menjadi ajang perebutan kekuasaan. Raja Mswati III naik tahta pada tanggal 25 April 1986 walaupun ditentang oleh kelompok pro demokrasi.

Sejak awal tahun 90-an Swaziland dilanda aksi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi yang menginginkan diberlakukannya sistem multi-partai. Perjuangan aktivis pro-demokrasi

tersebut pada hakekatnya telah berhasil, sebagaimana terbukti dengan adanya pemilu tahun 1993. Pemilu 1993 tersebut merupakan pemilu pertama kali setelah Raja Sobhuza II melarang keberadaan partai politik pada tahun 1973. Namun pemilu 1993 berdasarkan sistem demokrasi tradisional masih memberikan hak kepada Raja untuk mengangkat sebagian anggota parlemen, sehingga belum memuaskan pihak kelompok pro-demokrasi yang menilai pelaksanaan pemilu tersebut kurang demokratis.

Perjuangan aktivis pro-demokrasi di Swaziland itu terus berlanjut dan tidak hanya menuntut diadakannya sistem demokrasi multi-partai tetapi juga bermaksud untuk menghapus kekuasaan Raja yang dianggap terlalu berkuasa.

Sebagai tanggapan atas tuntutan kelompok pro demokrasi, Raja Mswati III di awal tahun 1996 menjanjikan akan meninjau kembali konstitusi Swaziland dan melakukan perubahan politik ke arah yang lebih demokratis tanpa meninggalkan identitas dan budaya Swaziland.

Sebagai realisasi dari janjinya tersebut maka Raja Mswati III pada tanggal 8 Mei 1996 membentuk Swazi National Council (SNC) sebuah lembaga yang ditugaskan untuk memberi nasehat kepada Raja dalam masalah reformasi konstitusi. Disamping itu pada tanggal 26 Juli 1996, Raja Mswati III secara resmi membentuk Constitutional Review Commission (CRC) yang diketuai Prince Mangaliso Dlamini.

Setelah membentuk SNC dan CRC, pada tanggal 9 Agustus 1996 Raja Mswati III memecat Perdana Menteri Prince Mbilini dan mengangkat Subisiso Dlamini sebagai Perdana Menteri baru. Keputusan Raja tersebut telah mendapat sambutan luas dari semua pihak di Swaziland karena S. Dlamini, yang adalah mantan Menteri Keuangan, mempunyai kredibilitas serta reputasi internasional sehingga diharapkan dapat membawa perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. Ketika dilantik sebagai Perdana Menteri, Dlamini menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya diharapkan dapat lebih transparan dan bertanggung jawab serta dapat menyelesaikan masalah politik dan ekonomi yang dihadapi Swaziland.

Namun demikian krisis politik di Swaziland terus berlanjut, terutama menjelang pemilu tahun 1998. Pada tanggal 9 Oktober 1998, Raja Mswati III membubarkan parlemen Swaziland, selama ketidakadaan parlemen, Raja menjalankan pemerintahan, dibantu oleh sebuah Dewan Menteri dan SNC.

Pada tanggal 16 Oktober 1998, telah dilangsungkan pemilu di Swaziland untuk memilih 55 anggota parlemen. Pemilu tersebut agaknya tidak cukup menarik minat rakyat Swaziland, yang nampak dari rendahnya jumlah pemilih yang mendaftar dan memberikan suara. Hal ini diperkirakan karena partai-partai politik dilarang di Swaziland, sehingga rakyat tidak melihat perlunya untuk memberikan suara.

Dari hasil pemilu tanggal 16 Oktober 1998, terdapat lima mantan anggota parlemen yang terpilih kembali. Parlemen Swaziland yang baru terbentuk tersebut, memulai masa persidangannya awal Pebruari 1999. Sementara itu Raja Mswati III mengangkat kembali Dr. Sibusiso Dlamini menjadi Perdana Menteri.

Ketika Raja Mswati III mengangkat kembali Sibusiso Dlamini sebagai Perdana Menteri hampir semua pihak di Swaziland, termasuk para tokoh pro demokrasi yang tergabung dalam Swaziland Democratic Alliance (SDA), menyambut dengan gembira keputusan Raja tersebut. Hal ini mengingat kredibilitas Sibusiso Dlamini, sehingga banyak pihak berharap proses demokrasi akan terus berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Upaya-upaya Raja Mswati III untuk memperbarui kehidupan politik, khususnya aspek demokrasi di Swaziland, tampaknya belum sepenuh hati. CRC, yang dibentuk Raja Mswati III untuk mengkaji ulang konstitusi Swaziland, telah berhasil menyusun Rancangan Konstitusi baru dan disampaikan kepada Raja pada tanggal 20 Nopember 2000. Akan tetapi Rancangan Konstitusi baru tersebut isinya tidak jauh berbeda dengan Konstitusi 1978, yang masih melarang adanya sistem multi partai dan melarang organisasi massa untuk melakukan kegiatan politik di Swaziland. Laporan CRC tersebut ditanggapi negatip oleh sebagian besar masyarakat Swaziland yang cenderung menghendaki adanya perubahan keadaan dengan diizinkannya multi partai.

Protes terhadap Raja dan pemerintah semakin memanas ketika Raja Mswati III mengeluarkan Keputusan No. 2 tahun 2001 yang sangat membatasi kebebasan pers, larangan multi partai dan tidak menghargai hak asasi manusia di Swaziland. Menanggapi aksi protes tersebut maka Raja Mswati III memberlakukan keadaan darurat yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Mr. Sibusiso Dlamini pada tanggal 23 Juni 2001 dan dianggap merupakan bencana kehidupan demokrasi di Swaziland. Dengan adanya desakan masyarakat maka Raja Mswati III terpaksa menarik kembali pemberlakuan Keputusan No. 2 tahun 2001 dan menggantikannya dengan Keputusan No. 3 tahun 2001 yang sedikit lebih fleksibel dan memberikan ruang gerak kepada dunia pers dan organisasi non-pemerintah lainnya yang ada di Swaziland. Pada tanggal 7 Februari 2006, pemerintah mengumumkan bahwa kontitusi baru akan mulai diberlakukan keesokan harinya.

Saat ini terdapat dua surat kabar nasional berbahasa Inggris yang terbit di Swaziland, yaitu Times of Swaziland dan The Swazi Observer. Kedua surat kabar ini dapat juga diakses melalui website masing-masing yaitu, www.times.co.sz dan www. Observer.org.sz. Pada tahun 2002 kelompok pro demokrasi kembali mengadakan unjuk rasa untuk menggagalkan rencana Raja Mswati III yang hendak membeli sebuah pesawat jet untuk kepentingan kerajaan seharga 720 juta emalangeni (kurang lebih 72 juta dollar amerika). Raja Mswati III juga pernah dituntut ke pengadilan oleh seorang Ibu karena anaknya yang masih pelajar di Sekolah Menengah telah diambil secara paksa oleh orang-orang istana yang akan dijadikan istri Raja. Pada saat ini Raja mempunyai 10 istri yang resmi.

3. Hubungan Luar Negeri

Dalam hubungan luar negerinya Swaziland bersifat netral namun, hubungannya dengan Blok Barat, khususnya Inggris sangat erat, sehingga Swaziland dinilai pro Barat. Swaziland juga menjalin hubungan yang erat dengan Israel dan Taiwan.

Pemerintah Swaziland mendukung Taiwan menjadi anggota PBB. Swaziland juga mendukung Komite Khusus PBB untuk mengkaji masalah keanggotaan Taiwan di PBB.

Swaziland adalah anggota pada organisasi internasional sbb: African Union (AU), SADC, COMESA, Commonwealth, NAM, G-77, ACP, ATDB, ECA, FAO, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRC, ICRM, IDA, IFAD, ILO, IMF, INTERSAT, INTERPOL, IOC, IPU, ITU, SACU, UNCTAD, UNESCO, UNICEF, UNIDO, UPU, WFP, WCO, WHO, WIPO, WMO, dan WTO.

Mengingat letak geografisnya yang tidak berpantai dan berbatasan langsung dengan Republik Afrika Selatan dan Mozambique, perekonomian Swaziland sangat bergantung kepada kedua negara tetangganya tersebut.

Pemerintah Swaziland berupaya untuk memelihara hubungan yang baik dengan Afrika Selatan. Dukungan organisasi pekerja Afrika Selatan kepada organisasi pekerja Swaziland (SFTU) dan penutupan perbatasan kedua negara oleh Afrika Selatan di saat terjadinya pemogokan pekerja Swaziland, menjadikan hubungan Swaziland dengan negara tetangganya, Afrika Selatan, terganggu.

Pada tanggal 18 Pebruari 2001 Wakil Presiden Afrika Selatan, Yacob Zuma yang didampingi oleh Menteri Pertahanan dan Agraria, Thoko Didiza, Menteri Kehakiman, Penuell Maduna dan Menteri Perburuhan, Membatshisi Mdladlana mengadakan kunjungan kenegaraan selama empat hari ke Swaziland. Kunjungan tersebut untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Msawati III, Perdana Menteri Sibusiso Dlamini dan para anggota kabinet untuk membicarakan peningkatan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi.

Wakil Presiden Afrika Selatan, Yacob Zuma menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak akan mencampuri masalah dalam negeri Swaziland, kecuali atas permintaan pemerintah Swaziland. Pemerintah Afrika Selatan menghormati kedaulatan negara tetangga karena masyarakat Swaziland dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri.

Wakil Presiden Yacob Zuma juga berjanji kepada Pemerintah Swaziland bahwa Pemerintah Afrika Selatan akan menyelidiki secara intensif kegiatan the Swaziland Solidarity Network (SSN) dan organisasi oposisi yang berkantor di Johannesburg, Mpumalanga dan KwaZulu Natal, Afrika Selatan.

Hubungan Swaziland dan Amerika Serikat sempat terganggu dengan dikeluarkannya keputusan Raja Mswati III tentang pembatasan kebebasan pers, larangan multi partai dan banyak kebijakan Pemerintah Swaziland yang dianggap telah melanggar hak azasi manusia. Amerika Serikat mengancam akan menarik seluruh perlakuan tarif khusus untuk komoditi ekspor Swaziland yang masuk ke pasar Amerika Serikat yang diatur dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) dan African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Pada bulan Desember 2002 Menlu Amerika Serikat Colin Powel telah mengirim surat kepada Pemerintah Swaziland yang intinya menegaskan kembali kebijakan Amerika Serikat yang akan mencabut hak-hak istimewa dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Swaziland yang diatur sesuai skema GSP dan AGOA. Kebijakan tersebut menindaklanjuti keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat bulan Nopember 2002 yang telah meninjau kembali daftar komoditi Swaziland yang masuk dalam peraturan GSP. Peringatan keras yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut karena Pemerintah Swaziland dianggap tidak menunjukkan perubahan pola pemerintahan ke arah yang baik.

Menanggapi masalah tersebut Ketua Coalition for Concerned Civic Organisations (CCCO) yang juga sebagai President of the Swaziland Employers and Chamber of Commerce and Industry, Mr. Mandla Hlatswayo menyatakan bahwa rencana dihapusnya GSP dan dicabutnya AGOA oleh Amerika Serikat akan sangat memberatkan perekonomian Swaziland. Para pelaku bisnis di Swaziland menilai bahwa hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat sangat strategis dan perlu dipertahankan, walaupun dalam kenyataannya *nilai ekspor Swaziland ke Amerika Serikat hanya sebesar 5, 2% dari nilai total ekspor* Swaziland.

V. Ekonomi

Sebagai negara tidak berpantai (land-locked country), kegiatan ekonominya pada sektor pertanian dan industri pertanian, terutama gula, jeruk dan bubuk kayu yang melibatkan 80% dari jumlah penduduk. Sektor-sektor yang tumbuh dengan cepat adalah produksi konsentrat minuman ringan, produk makanan, tekstil dan kertas. Manufaktur sejak pertengahan tahun 1980-an merupakan sektor yang diandalkan pemerintah dalam perolehan devisa negara, sementara sektor pertambangan tampak kurang menggembirakan.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Swaziland sangat tergantung pada Afrika Selatan. Pemerintah Swaziland terus berupaya memperbaiki kondisi perekonomiannya, khususnya menarik minat para investor asing sebanyak-banyaknya dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif.

Kelambanan pertumbuhan ekonomi Swaziland pada tahun 2005, yang hanya 1.8% adalah akibat dari terjadinya musim kemarau panjang (seperempat penduduk Swaziland karenanya membutuhkan bantuan pangan) dan penyakit HIV / AIDS yang telah diidap oleh lebih dari sepertiga penduduk dewasa.

Kondisi fiskal Swaziland cukup memprihatinkan karena kecilnya produk domestik bruto, yang berakibat rendahnya pendapatan pajak negara (corporate tax revenue), dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian Afrika Selatan yang diatur melalui mekanisme Southern African Customs Union (SACU). Sektor fiskal Swaziland cenderung kurang independen, hal ini terlihat dari pematokan nilai tukar uang Swaziland (Lilangeni) yang selalu dihargai sama dengan mata uang Afrika Selatan (Rand).

Pemerintah Swaziland telah menetapkan strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang dikenal sebagai National Development Strategy (NDS). Program ini berisikan visi pembangunan Swaziland hingga tahun 2022 mendatang. Sedangkan program pembangunan ekonomi jangka pendek ditetapkan dalam konsep Economic and Social Reform Agenda (ESRA).

The Economist Inteligence Unit memperkirakan bahwa defisit pada budget 2006/07 akan berkisar pada 2 % dari GDP, dibanding dengan 4,3 % sewaktu tahun anggaran 2005/06 laju inflasi (y-o-y) pada tahun 2005 adalah sebesar 4,1 %

Dalam hal kebijakan moneter, Swaziland akan tetap mempertahankan keanggotaannya pada Common Monetary Area (CMA), dengan pertimbangan agar mata uang Swaziland Lilangeni, nilainya tetap setara dengan mata uang Afrika Selatan (Rand). Dalam hal ini Bank Sentral Swaziland akan terus mengikuti kurs mata uang Rand yang ditetapkan oleh Bank Sentral Afrika Selatan (SARB). Guna mempertahankan keseimbangan suku bunga dan menghindari spekulasi arus dana (capital flows) antara Swaziland dan Afrika Selatan, pihak Afrika Selatan telah mencanangkan kebijakan "hard line on inflation" yaitu antara 3-6% dengan terus memperketat kebijakan moneter.

Perkembangan ekonomi Swaziland dapat di lihat dalam tabel indikator ekonomi Swaziland sbb;

Indikator Ekonomi Makro Swaziland

Indikator-indikator ekonomi	2003	2004	2005
GDP at market prices (E bn)	13.9	17.1	18.5
GDP (US$ bn)	1.8	2.7	2.9
Real GDP growth (%)	2.2	2.1	1.8
Consumer price inflation (av;%)	7.3	3.4	5.3
Population (m)	1.0	1.0	1.0
Export of goods fob (US$ m)	1,484.8	1,877.9	2,019.0
Import of goods cif (US$ m)	1,441.1	1,909.9	2,075.9
Current-account balance (US$ m)	36.3	39.8	16.8
Foreign Exchange Reserves excl gold (US$ m)	227.5	323.6	320.5
Total external debt (US$ bn)	393	432	460
Debt-service ratio (%)	2.6	3.4	3.6
Exchange rate (av E$:US)	7.6	6.5	6.4

Sumber : EIU Country Report 2006

Negara Tujuan Ekspor dan Impor
Tahun 2000

Ekspor		*Impor*	
Afrika Selatan	59.7%	Afrika Selatan	95.6%
Amerika Serikat	8.8%	Uni Eropa	0.9
Uni Eropa	8.0%	Jepang	0.9%
Mozambique	6.2%	Singapura	0.3%

Sumber : EIU Country Report 2006

Lain-lain :

1.	Laju inflasi	: 5,3% (yoy 2005)
2.	Komoditi Ekpor	: Konsentrat minuman ringan, soft drink gula, bubuk kayu, serat kapas (cotton yarn), citrus dan buah kalengan.
3.	Produk pertanian	: Tebu, kapas, jagung, tembakau, beras, citrus, nenas, sorgum, daging sapi, kacang-kacangan, kambing dan domba.
4.	Industri	: Pertambangan (batu bara, bahan asbestos), bubuk kayu (pulp), gula, minuman ringan (soft drink *concentartes*), *tekstil dan apparel.*

VI. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - SWAZILAND

a. Politik

1. Hubungan diplomatik Indonesia - Swaziland secara resmi dibuka tanggal 12 April 1991. Kedutaan Besar RI di Harare, Zimbabwe, yang dibuka pada bulan Desember 1986 merangkap Swaziland. Sedangkan Kedutaan Besar Swaziland di Kuala Lumpur diakreditasikan pula kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 21 September 2000, pemerintah Indonesia telah menyetujui pencalonan David Mabili Dlamini, sebagai Duta Besar Kerajaan Swaziland untuk Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Dubes David Dlamini telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 Juli 2001, dan hingga sekarang masih menjabat.

2. Hubungan bilateral kedua negara telah terbina dengan baik, karena masing-masing pihak pada umumnya mempunyai pandangan yang sama dalam berbagai forum sub regional, regional dan internasional. Kedua negara memiliki potensi kerjasama di bidang perdagangan, investasi, turisme, ilmu pengetahuan dan teknologi serta di bidang sosial/budaya dan penerangan. Eratnya hubungan baik tersebut ditandai pula dengan kunjungan dan pertemuan para pejabat ke dua negara, yaitu :

   a. Kunjungan Raja Mswati III ke Bali pada tanggal 4 Agustus 2002. Pada 18-23 Maret 2003, Raja kembali mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri.

   b. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Swaziland pada kesempatan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johanesburg, Afrika Selatan pada tanggal 2 – 4 September 2002. Dalam pertemuan tersebut antara lain disinggung keinginan Swaziland untuk membuka Kudataan Besarnya di Jakarta.

c. Penandatanganan MoU mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia – Swaziland yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI ad interim Susilo Bambang Yudoyono dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Swaziland saat itu Mr Abednego Ntshangase, di Jakarta pada bulan Maret 2003.

d. Menteri Luar Negeri RI Dr. N. Hasan Wirajuda menghadiri Sidang ke-1 Komisi Bersama Indonesia – Swaziland di Mbabane pada tanggal 25-26 Maret 2004. Sedangkan Sidang ke-2 Komisi Bersama direncanakan dilaksanakan pada paruh tahun 2007, namun sampai saat ini belum ada jadwal yang pasti.

e. Pemerintah Swaziland juga telah memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

b. Ekonomi

1. Hubungan Indonesia-Swaziland dibidang ekonomi dan perdagangan masih belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan karena banyak komoditas Swaziland yang sama dengan Indonesia dan Swaziland juga lebih banyak berhubungan dengan negara-negar Afrika sendiri khusunya Afrika Selatan. Pihak swasta Indonesia pernah mengimpor asbestos dari Swaziland melalui pelabuhan Durben di Afrika Selatan tahun 1991.

2. Untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara telah diadakan upaya-upaya sbb:

   a. Pertemuan Menteri Perusahaan dan Tenaga Kerja Swaziland Lutfo E. Dlamini dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, Rini MS. Soewandi di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2002. Dalam pertemuan tersebut Menteri Dlamini menyampaikan keinginan Pemerintah Swaziland untuk meningkatkan perdagangan langsung yang saling menguntungkan ke dua negara. Hal yang sama dikemukakan oleh Menteri Dlamini dalam pertemuannya dengan para pengusaha dan KADIN Indonesia di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2002.

   b. Penandatanganan suatu MoU tentang kesepakatan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Ketua KADIN Indonesia Komite Afrika Bagian Selatan, Hariyono Edi Widiyarto dan Menteri Perusahaan dan Tenaga Kerja Swazilan Dlamini. MoU tersebut berisikan kesepakatan untuk memperlancar dan memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi secara nyata melalui sejumlah proyek, yaitu pengembangan industri tektil dan pakain jadi, pemrosesan produk-produk kertas untuk ekspor, pendirian perusahaan patungan untuk fibre glass, kerjasama pemrosesan dan pemasaran produk-produk furniture, pendirian pusat distribusi barang-barang Indonesia dan kerjasama di bidang ekonomi dan pertelevisian.

c. Telah diadakan pertemuan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2002, antara Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirayuda dengan Raja Mswati III, yang mengharapkan agar ke dua negara dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dengan mendorong kontak langsung antara para pelaku bisnis.

d. Swaziland telah menyusun sebuah draft Trade Agreement Indonesia-Swaziland. Pada tanggal 17 September 2002 Pemerintah Indonesia telah mengajukan counter draft kepada Pemerintah Swaziland dan mengaharapkan agar persetujuan pergadangan tersebut segera ditandanganni.

e. Pada tanggal 14 Juli 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri telah menyetujui pengangkatan Mr. Kareem Ashraff sebagai Konsul Jenderal Kehormatan RI yang berkedudukan di Mbabane, Swaziland.

VII. SUSUNAN KABINET SWAZILAND

1.	Perdana Menteri	: Themba Dlamini
2.	Wakil Perdana Menteri	: Albert Shabangu
3.	Menteri Pertanian dan Ko-operasi.	: Mtiti Fakudze
4.	Menteri Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan	: Rev. Absalom Dlamini
5.	Menteri Pendidikan	: Constance Simelane
6.	Enterprise & Tenga Kerja	: Lutfo Dlamini
7.	Menteri Keuangan	: Majozi Sitole
8.	Menteri Luar Negeri dan Perdagangan	: Mathendele Dlamini
9.	Menteri kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	: Mfomfo Nkambule
10.	Menteri Dalam Negeri	: Prince Gabheni
11.	Menteri Perumahan dan Pembangunan Kota.	: Mabili Dlamini

12.	Menteri Kehakiman dan Urusan Konstitusi.	: Prince David
13.	Menteri Perberdayaan Alam dan Energi	: Dumsile Sukati
14.	Menteri Pelayanan Masyarakat dan Penerangan	: Themba Msibi
15.	Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi.	: Elijah Shongwe
16.	Menteri Pariwisata, Lingkungan dan Perhubungan.	: Thandi Shongwe
17.	Gubernur Bank Sentral Swaziland	: Martin Dlamini.

VIII. Sketsa kegiatan/undangan diplomatik

Para kepala Perwakilan diplomatik asing yang diakreditasi untuk kerajaan Swaziland selalu diundang untuk menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun Raja tanggal 19 April dan Peringatan Hari Kemerdekaan Swaziland tanggal 26 April serta Resepsi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Menlu Swaziland dalam rangka menyambut Tahun Baru.

IX. Hal hal yang Masalah yang belum terselesaikan:

a. Rencana Pembukaan Kedutaan Besar Swaziland di Jakarta yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Swaziland, Abednego Ntshangase kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda pada saat menghadiri KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tanggal 2 – 4 September 2002.

b. Tanggapan pemerintah Swaziland terhadap counter draft Trade Agreement usulan pemerintah Indonesia yang disampaikan dengan Nota KBRI No. 03/IX/2002 tanggal 24 September 2002 dan No. 08/II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003.

c. Sidang Kedua Joint Commission Indonesia-Swaziland yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 ditunda menjadi tahun 2007.

d. Tindak lanjut hasil KTT Asia Afrika di Jakarta bulan April 2005.

e. Permintaan dukungan kepada pemerintah Swaziland untuk pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, periode Mei 2006 s/d Mei 2007 dan sebagai anggota Executive Board WHO periode 2007 – 2010. Serta sebagai anggota Dewan ICAO periode 2007 - 2010.

f. Kunjungan pamitan Dubes RI – Harare kepada Raja Mswati III dan atau PM Dlamini serta Menlu Swaziland.

g. Penyerahan Credentials Dubes RI- Pretoria sebagai Duta Besar LB & BP RI yang baru untuk kerajaan Swaziland kepada Raja Mswati III.

---------- **** ----------